



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DANA ALOKASI KHUSUS DAN BELANJA TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA PADA PEMERINTAH
PROVINSI MALUKU**

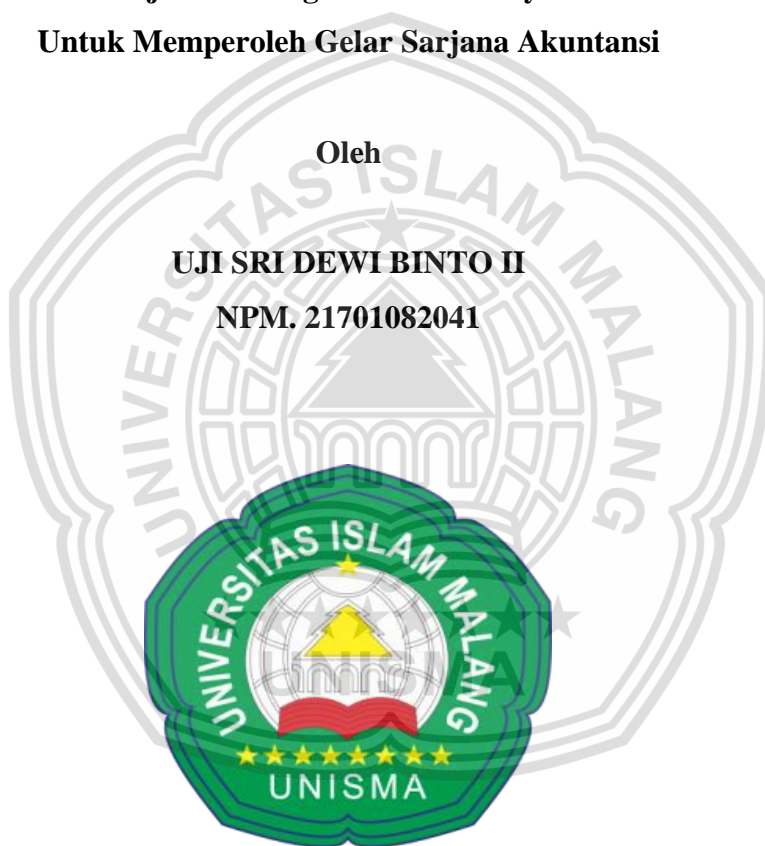
SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**

Oleh

UJI SRI DEWI BINTO II

NPM. 21701082041



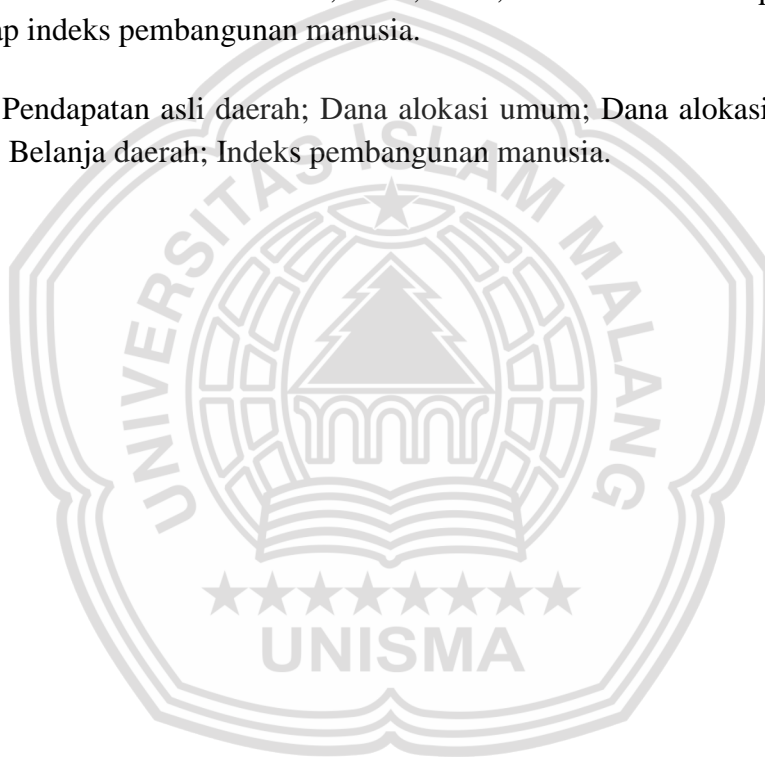
**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
MALANG**

2022

ABSTRAK

Sambil mendorong otonomi daerah dan desentralisasi keuangan, pemerintah daerah bebas mengelola dan memanfaatkan sumber daya lokal sebagaimana mestinya. Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Provinsi Maluku dipengaruhi oleh pemahaman dan penilaian pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja. Strategi kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis korelasi. Hasil uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 47.158, dan nilai F tabel sebesar 2,42. Mengingat $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$ sama dengan $47.158 > 2,42$, maka dapat diasumsikan bahwa variabel DAU, DAU, DAK, dan DBH memiliki pengaruh umum terhadap indeks pembangunan manusia.

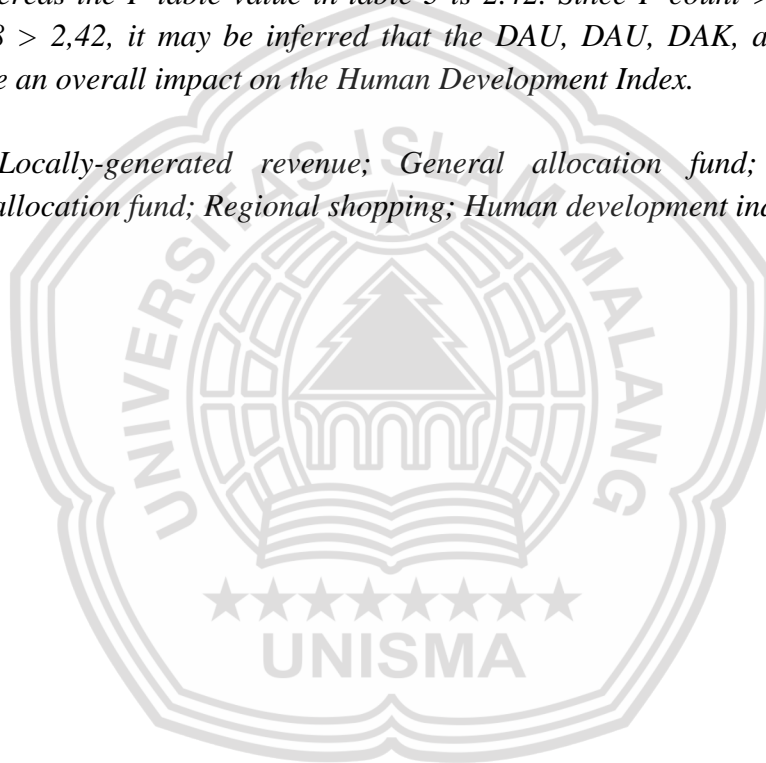
Kata Kunci: Pendapatan asli daerah; Dana alokasi umum; Dana alokasi khusus; Belanja daerah; Indeks pembangunan manusia.



ABSTRACT

Local governments are permitted to manage and utilize regional revenue streams in accordance with the wishes of their constituents when regional autonomy and fiscal decentralization are put into place. Knowing and assessing regional original income, general allocation funds, special allocation funds, and expenditures all at once has an impact on the Maluku province Government's Human Development Index. Correlational analysis is used in conjunction with quantitative methodologies in this work. Based on the results of the F test, the calculated F value is 47,158, whereas the F table value in table 3 is 2.42. Since $F_{count} > F_{table}$ equals $47,158 > 2,42$, it may be inferred that the DAU, DAU, DAK, and DBH variables have an overall impact on the Human Development Index.

Keywords: *Locally-generated revenue; General allocation fund; Special allocation fund; Regional shopping; Human development index.*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak dirubahnya sistem pemerintahan di Indonesia yang pada awalnya menganut sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi atau dikenal dengan sebutan otonomi daerah pada tahun 2001, pemerintah daerah memiliki wewenang dalam mengatur rumah tangganya sendiri dengan meminimalkan intervensi dari pemerintah pusat. Kebijakan otonomi daerah di Indonesia diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Otonomi daerah dipandang lebih demokratis dan mencerminkan desentralisasi yang sesungguhnya karena masing-masing daerah dapat lebih leluasa menggali potensi-potensi yang ada di daerahnya (Wertianti, 2013). Sistem otonomi daerah juga diharapkan dapat mempercepat laju pembangunan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Pelaksanaan otonomi daerah akan membawa suatu konsekuensi logis, bahwa tiap daerah harus berkemampuan untuk memberdayakan dirinya sendiri, baik dalam kepentingan ekonomi, pembinaan sosial kemasyarakatan, dan

pemenuhan kebutuhan untuk membangun daerahnya serta dapat melaksanakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat (Samad & Iyan, 2013).

Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang semuanya dipersiapkan dan dilaksanakan oleh daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah tersebut. Pesatnya pembangunan daerah membutuhkan alokasi dana pembangunan yang besar sehingga menyebabkan belanja pemerintah daerah juga semakin meningkat.

Sumber-sumber utama keuangan daerah yang digunakan untuk membiayai belanja daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Besarnya PAD dapat dijadikan tolak ukur seberapa besar kemandirian suatu daerah dalam membiayai pembangunan daerahnya. Penerimaan daerah yang bersumber dari PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah, sehingga juga meningkatkan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik tentunya akan berdampak pada semakin sejahteranya masyarakat dan akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (Putra & Ulupui, 2015).

Terjadinya ketimpangan PAD antar provinsi di Indonesia, maka melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdapat sumber lainnya yang dapat digunakan dalam pembangunan daerah yaitu dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH), dan lain-lain pendapatan yang sah.

DAU yang berasal dari pemerintah pusat merupakan dana yang dialokasikan untuk tujuan pembiayaan pengeluaran dan kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Hal ini berarti terjadi transfer dari pemerintah pusat kepada daerah, dan pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini guna untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sehingga meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan standar kehidupan masyarakat, dan menciptakan hidup yang sehat dan harapan hidup yang lebih panjang (Harahap, 2010).

Selain DAU, terdapat juga DAK yang memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Pemanfaatan dan penggunaan DAK menjadi faktor penting dalam program pembangunan daerah. Adanya pembangunan di daerah akan mampu mendorong Pemda agar meningkatkan mutu kualitas pembangunan manusia yang secara otomatis berorientasi pada kesejahteraan publik. Jika DAK dapat dikelola dengan baik, dapat memperbaiki mutu pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan, dan mengurangi kerusakan infrastruktur (Putra & Ulupui, 2015).

Menurut Sumiyati (2011), jika status pembangunan manusia masih berada pada kriteria rendah hal ini berarti kinerja pembangunan manusia harus ditingkatkan atau masih memerlukan perhatian khusus untuk mengejar

ketinggalannya, sebaliknya jika status pembangunan manusia berada pada kriteria menengah berarti masih perlu ditingkatkan atau dioptimalkan. Jika pembangunan manusia suatu daerah berada pada kriteria tinggi berarti kinerja pembangunan manusia sudah optimal dan harus dipertahankan agar kualitas sumber daya manusia tersebut produktif sehingga memiliki produktivitas yang tinggi sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan suatu negara diharapkan mampu memberikan hasil nyata yaitu *Pro Growth, Pro Poor, Pro Job dan Pro Environment* yang artinya menciptakan pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan dan pelestarian lingkungan untuk kesejahteraan rakyat.

Sumber pembiayaan lainnya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bantuan keuangan provinsi. Hal tersebut harus diikuti juga dengan alokasi belanja yang tepat. Penelitian yang peneliti lakukan ini, merupakan pengembangan ide dari penelitian sebelumnya oleh Setyowati dan Suparwati (2012) dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah). Setyowati dan Suparwati (2012) mengamati sebanyak 4 (empat) variabel independen, 1 (satu) variabel dependen dan 1 variabel intervening, yaitu pertumbuhan ekonomi, DAU, DAK dan PAD sebagai variabel independen, Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel dependen dan pengalokasian anggaran belanja modal sebagai variabel intervening.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Provinsi Maluku”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Provinsi Maluku ?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Provinsi Maluku?
3. Apakah Dana Alokasi Umum Berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Provinsi Maluku?
4. Apakah Dana Alokasi Khusus Berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Provinsi Maluku?
5. Apakah Belanja Berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Provinsi Maluku ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan Menganalisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Provinsi Maluku.

2. Mengetahui dan Menganalisis Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Provinsi Maluku.
3. Mengetahui dan Menganalisis Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Provinsi Maluku.
4. Mengetahui dan Menganalisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Provinsi Maluku.
5. Mengetahui dan Menganalisis Pengaruh Belanja terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Provinsi Maluku.

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Provinsi Maluku.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan dari pelaksanaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Provinsi Maluku.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku selama tahun 2016-2021. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Uji t (Parsial)

Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| (Constant) | 145.968 | 22.634 | | 6.449 | .000 |
| 1 | | | | | |
| PAD | 6.870 | .606 | .730 | 11.337 | .000 |
| DAU | -9.599 | 1.009 | -.660 | -9.517 | .000 |
| DAK | -.673 | .349 | -.127 | -1.929 | .055 |
| DBH | 1.003 | .560 | .104 | 1.790 | .075 |

Sumber: Data Sekunder diolah 2022

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh Positif terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) pada Pemerintah Provinsi Maluku selama tahun 2020-2021. Hal ini menggambarkan semakin baik Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka akan berdampak pada indeks pembangunan manusia (IPM) yang semakin baik pula.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Pemerintah Provinsi Maluku selama tahun 2020-2021. Hal ini menggambarkan semakin besar kemampuan Dana Alokasi Umum (DAU) akan menurunkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Pemerintah Provinsi Maluku selama tahun 2020-2021. Hal ini berarti bila Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berdampak apa-apa terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
4. Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Pemerintah Provinsi Maluku selama tahun 2020-2021. Hal ini menggambarkan bila Dana Bagi Hasil (DBH) belum dimaksimalkan keefektifannya, maka belum mampu memberikan dampak pada meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur, namun memiliki keterbatasan yaitu:

1. Penelitian ini hanya dilaksanakan di Pemerintah Provinsi Maluku dan hanya pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak mencakup semua di Pemerintah Provinsi Maluku, sehingga hasil penelitian hanya bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku.
2. Penelitian ini hanya menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sedangkan masih banyak faktor yang lain yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang perlu diteliti

5.3 Saran

Berdasarkan perolehan dari jawaban responden dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Provinsi Maluku diharapkan dapat mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan dan perekonomian demi meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
2. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menambah variabel lain yang dapat berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan menambah jumlah sampel dengan cara memperluas wilayah penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta Salemba Empat.
- Adiputra, I Made Pradana, Ni Kadek Desi Dwi Yantari, Dewa Kadek Darmada. 2015. *Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan SiLPa terhadap Kualitas Pembangunan Manusia dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Intervening*. Simposium Nasional Akuntansi 18 Medan 16-19 September 2015.
- Alicha Eka Puspitasari (2022) ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2016-2018) PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2022
- Anggarini, Tika dan Sutaryo. 2015. *Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Provinsi di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi 18 Medan 16-19 September 2015.
- Ardiansyah dan Vitalis Ari Widiyaningsih. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah*. Simposium Nasional Akuntansi 17 Lombok 24-27 September 2014.
- Badan Pusat Statistik. 2016. Booklet IPM Metode Baru, (Online), (<http://www.bps.go.id>), diakses tanggal 24 Januari 2016).
- Badan Pusat Statistik. 2016. IPM 2010-2014, (Online), (<http://www.bps.go.id>),
- Badan Pusat Statistik. 2016. Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2012-2015, (Online), (<http://www.bps.go.id>), diakses tanggal 23 Januari 2016).
- Badrudin, Rudy dan Mufidhatul Khasanah. 2011. *Pengaruh Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap Pembangunan Manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. *Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan Volume 9*, Nomor 1, April 2011 23-30. diakses tanggal 23 Januari 2016).
- Gede Ferdi Williantara (2016) PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN DANA

BAGI HASIL PADA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA E-Jurnal
Akuntansi Universitas Udayana Vol.16.3. September (2016): 2044-2070

- Mahmudi, 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Penerbit UUP STIM YKPN, Yogyakarta
- Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi Yogyakarta
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Edisi Revisi. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Wertianti Dan Dwiranda. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pada Belanja Modal Dengan Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Ilmiah Akuntansi, Universitas Udayana, Bali.